



Judul : Pengesahan RUU PPRT Cegah Eksploitasi
Tanggal : Selasa, 08 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Pengesahan RUU PPRT Cegah Eksploitasi

LEBIH dari 400 pekerja rumah tangga (PRT) setiap tahunnya mengalami kekerasan selama bekerja. Koordinator Nasional Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini mengungkapkan setiap hari lembaganya mendapatkan aduan kasus kekerasan terhadap PRT. Baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun kekerasan ekonomi.

"Hampir tiap hari juga kami mendapat WA, *e-mail*, soal kasus PRT yang jadi korban penipuan, dan modus perdagangan orang dari penyalur. Ada PRT melaporkan tidak bisa pulang, gaji masih ditahan, dia dijanjikan penyalur dia akan dipekerjakan. Kenyataannya gaji tidak sesuai seperti yang dijanjikan, kerjanya berlebihan, sampai dia mundur, sam-

pai sekarang gajinya enggak diberikan," kata Lita kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Praktik-praktik kekerasan yang terus menimpa PRT, kata Lita, tak bisa dicegah apabila tidak ada keseriusan dari pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mendorong dari sisi regulasi. "Kasus penyiksaan PRT yang belakangan viral, Rohimah dan Riski itu harusnya bisa membuka mata pembuat kebijakan untuk segera mengesahkan RUU PPRT sebagai inisiatif DPR. Ini sudah hampir 20 tahun kita menunggu undang-undang ini untuk disahkan, tetapi kenyataannya masih belum bisa membuka mata mereka betapa PRT ini tidak dalam keadaan baik-baik saja," ujar Lita.

Sebagai pekerja yang bekerja

di wilayah rentan kekerasan dan eksploitasi, semestinya pemerintah bisa membuka mata dan melihat betapa penting dan berartinya RUU PPRT itu disahkan untuk hidup mereka.

Sementara itu, Ketua Panja RUU PPRT Willy Aditya menyebutkan pekerjaan Badan Legislasi telah selesai, yakni mengesahkan draf RUU PPRT dan naskah akademiknya. Hanya saja, kini bola ada di tangan Pimpinan DPR Puan Maharani. "Tinggal disepakati saja di paripurna untuk menjadi hak inisiatif DPR. Itu saja yang belum kejadian," kata Willy.

"Memang ada beberapa fraksi yang enggak setuju dan itu biasa. Namun, kan sekarang ini kita hanya menunggu, pimpinan DPR kita ini punya *good will* atau tidak," tandasnya. (Dis/H-3)